



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan "*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024*" dapat diselesaikan. LKIP disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB tahun 2024 merupakan pelaporan kinerja dalam rangka menginformasikan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian sesuai Sasaran Strategis dalam mewujudkan Misi, Visi dan Tujuan Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan LKIP tahun berikutnya, dan semoga LKIP ini dapat dijadikan sebagai instrumen perencanaan dalam pengambilan kebijakan, kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKIP ini disampaikan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataramba, 14 Februari 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Gambaran Organisasi	2
1.5 Sistematika Penulisan	9
1.6 Permasalahan dan isu Strategis	11
1.7 Dasar Hukum	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026	15
2.2 Rencana Strategis 2024-2026	18
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	23
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	33
3.1.1 Capaian Sasaran "Meningkatnya kualitas SOM UKM NTB yang KUAT" dengan Indikator Sasaran Persentase Jumlah Start-Up (perusahaan rintisan) yang Berkembang dari Pelatihan kewirausahaan	35
• Membandingkan Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	36
• Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	37
• Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	38
• Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional	38

	• Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	30
3.1.2.	Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya pemerataan pendapatan koperasi UMKM" dengan Indikator Peningkatan Pertumbuhan produktivitas Sub Sektor KUMK.....	40
	• Membandingkan Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... • Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya..... • Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis..... • Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional..... • Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	40 42 43 43 43
3.1.3	Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya perlindungan sosial, pengentangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi dengan Indikator Persentase Koperasi Modern.....	47
	• Membandingkan Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... • Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya..... • Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis..... • Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional..... • Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	47 58 58 59 59
3.1.4	Sasaran Strategis 4 "Meningkatnya kemandirian lokal Koperasi UKM" dengan Indikator Persentase peningkatan pemerataan PAD Dinas Koperasi UKM (Retribusi).....	61
	• Membandingkan Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... • Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya..... • Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis..... • Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional..... • Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	61 61 63 63 64

3.1.5	Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	65
3.1.6	Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber daya	69
3.1.7	Realisasi Anggaran	74
BAB IV	PENUTUP	75
4.1	Kesimpulan atas Capaian Kinerja	79
4.2	Langkah-Langkah dalam rangka peningkatan kinerja	82

Lampiran – Lampiran

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Data Pegawai Berdasarkan Eselon Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Bulan Desember Tahun 2024	5
Tabel 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Bulan Desember Tahun 2024	6
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Bulan Desember Tahun 2024	7
Tabel 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Bulan Desember Tahun 2024	7
Tabel 1.5	Data Penyebaran Pegawai pada Masing Masing Bidang Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2023- desember 2024	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran RPD NTB 2024 dan Tujuan Sasaran Strategis 2024-2026	19
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Daerah, dinas Koperasi UKM Provinsi NTB 2024 -2026	21
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Diskop UKM NTB Tahun 2024	22
Tabel 2.4	Indikator Kinerja dan Target RENSTRA Dinas Koperasi UKM NTB Tahun 2024-2026	24
Tabel 2.5	IKU 2024 Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	26
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	29
Tabel 3.1	Target dan realisasi Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Diskop UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	36
Tabel 3.2	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024	36
Tabel 3.3	Strat-Up yang berkembang dari Kegiatan Pelatihan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024	37
Tabel 3.4	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024	38

Tabel 3.5	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024...	40
Tabel 3.6	Jumlah UMKM Provinsi NTB per 31 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Kategori Usaha Berdasarkan Nilai Penjualan	42
Tabel 3.7	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024.....	43
Tabel 3.8	Realisasi Capaian Kinerja PLUT-KUKM pada Dinas Koperasi-UKM Provinsi NTB.....	46
Tabel 3.9	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 ..	48
Tabel 3.10	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Provinsi NTB Tahun 2024 ..	49
Tabel 3.11	Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Provinsi NTB Tahun 2023-2024	49
Tabel 3.12	Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024 Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	50
Tabel 3.13	Koperasi Modern Binaan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024.....	51
Tabel 3.14	Jumlah Koperasi Syariah Provinsi NTB Tahun 2024.....	55
Tabel 3.15	Daftar Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba Provinsi NTB S/D Tahun 2024	56
Tabel 3.16	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024.....	59
Tabel 3.17	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	53

Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2023 dan 2024.....	62
Tabel 3.19	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024.....	63
Tabel 3.20	Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi Ukm Provinsi NTB Tahun 2024	65
Tabel 3.21	Tabel Efisiensi Anggaran Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024	70
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Program Kegiatan Pendukung Gerakan Strategis Tahun 2024 Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	74

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	7
------------	---	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024 adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Oleh karena itu LKIP Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur selama tahun 2024 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku serta berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lain yang nantinya dapat menjadi bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja, serta upaya perbaikan secara terus menerus (*continued improvement*) menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*).

Dengan diusungnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 diharapkan dapat (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2) Mendorong Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, (3) kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat, (4) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan kinerjanya, (5) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.



1.2 Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 ini untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, disamping itu merupakan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan Koperasi dan UMKM, baik kepada Gubernur selaku atasan dan pemberi mandat maupun kepada masyarakat umum (publik).

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, yaitu mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan isu-isu strategis dalam Rencana Strategi Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan ini mencakup seluruh pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang dan tugas Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu satu tahun (1 Januari s.d. 31 Desember 2024).

1.4 Gambaran Organisasi

4.1. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi NTB mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tugas Pembantuan dan Tugas Dekonsentrasi. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Koperasi UKM mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
2. Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, keuangan, umum dan kehumasan serta pengesahan badan hukum koperasi;
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
4. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah;
5. Penyusunan rumusan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.

4.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2021 terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pembinaan Koperasi ;
4. Bidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah ;
5. Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam
6. Bidang Pengawasan Koperasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Widyaiswara



- b. Pranata Komputer
 - c. Anjalis
 - d. Pustakawan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
- a. Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM
 - d. Seksi Fasilitas Pengembangan KUMKM

4.3. Struktur Organisasi

GAMBAR 1.1



4.4. Personalia

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB kondisi per 31 Desember 2024 sebanyak 66 orang. Jumlah pegawai tahun 2024 tersebut tidak sama dengan tahun 2023 sebanyak 70 orang. Disamping itu, terdapat pegawai tidak tetap (Honorer Daerah) sebanyak 1 orang sehingga total PNS dan PTT sebanyak 66 orang.

TABEL 1.1
DATA PEGAWAI BERDASARKAN ESELON
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
BULAN DESEMBER TAHUN 2024

No	Urutan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Eselon II	1 orang	
2	Eselon III	6 orang	
3	Eselon IV	5 orang	
4	Pejabat Fungsional	13 orang	
5	Pegawai Non Struktural	40 orang	
6	P T T	1 orang	
Jumlah		66 orang	

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2024



TABEL 1.2
DATA PE GAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
BULAN DESEMBER 2024

No.	Gol/Ruang	Jabatan			Total
		Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	
1	Golongan IVe	-	-	-	-
2	Golongan IVd	1	1	-	2
3	Golongan IVc	-	1	-	1
4	Golongan IVb	4	-	-	4
5	Golongan IVa	3	3	1	7
6	Golongan III d	3	6	10	19
7	Golongan III c	1	-	12	13
8	Golongan III b	-	-	4	4
9	Golongan III a	-	3	1	4
10	Golongan II d	-	-	7	7
11	Golongan II c	-	2	-	2
12	Golongan II b	-	-	-	-
13	Golongan II a	-	-	-	-
14	Golongan I d	-	-	2	2
15	Golongan I c	-	-	-	-
16	Golongan I b	-	-	-	-
17	Golongan I a	-	-	-	-
18	PTT	-	-	1	1
TOTAL		12	13	38	66

Sumber : Daftar Urutan Kepengkatan Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2024



TABEL 1.3
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
BULAN DESEMBER 2024

No	Pendidikan	Jabatan				Total
		Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	PTT	
1	S.2	7	4	4	-	15
2	S.1	5	0	21	1	26
3	Sarjana II	-	2	2	-	4
4	SLTA	-	-	9	-	9
5	SLTP	-	-	-	-	-
6	SD	-	-	2	-	2
Jumlah		12	16	28	1	66

Sumber : Daftar Under Kepegawaian Dinas Koperasi UKM Prov. NTB 2024

TABEL 1.4
DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
BULAN DESEMBER 2024

No	Kelamin	Jabatan				Total
		Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	PTT	
1	Laki-laki	6	7	15	-	28
2	Pereempuan	6	9	13	1	29
Jumlah		12	16	28	1	66

Sumber : Daftar Under Kepegawaian Dinas Koperasi UKM Prov. NTB 2024

TABEL 1.8
DATA PENYEBARAN PEGAWAI PADA MASING MASING BIDANG
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
 Tahun 2023 – desember 2024

No.	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024 (PER 31 DESEMBER)	KET.
1.	Kepala Dinas/Sekretariat	20	22	2 org mutasi, 3 orang pensiun
2.	Bidang Pembinaan Koperasi	8	8	
3.	Bidang FPSP + PTT	6	7	
4.	Bidang Pembinaan UMKM	6	5	
5.	Bidang Pengawasan Koperasi	9	7	
6.	Ratai Oklat Koperasi UMKM	10	17	
Jumlah		71	96	

Sumber : Data Unit Kerja Perangkat Dinas Koperasi UKM Prov. NTB, 2024

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup
- 1.4 Gambaran Organisasi
- 1.5 Sistematika Penulisan
- 1.6 Pemmasalahan dan isu Strategis
- 1.7 Dasar Hukum

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026
- 2.2 Rencana Strategis 2024-2026
- 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1.1 Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya kualitas SDM UKM NTB yang KUAT" dengan Indikator Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dan pelatihan kewirausahaan

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- 3.1.2 Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya pemerataan pendataan koperasi UMKM" dengan Indikator Persentase Pertumbuhan produktivitas Sub Sektor KUKM

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan

3.1.3 Sasaran Strategis 3 ¹ Meningkatkan perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi dengan Indikator Persentase Koperasi Modern

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

3.1.4 Sasaran Strategis 4 ² Meningkatkan kemandirian fiskal Koperasi UKM dengan Indikator Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi UKM (Retribusi)

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional

- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

3.1.5 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

3.1.7 Realisasi anggaran

SAB. IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Langkah lanjut dalam rangka peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

1.6 Permasalahan dan isu strategis

6.1 Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan Koperasi dan UKM yaitu:

1. Rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga pengelolaan koperasi kurang sehat kurang transparan dan akuntabel, menyebabkan tingginya persentase koperasi tidak aktif yang menjadikan sasaran pembinaan koperasi dalam rangka meningkatkan koperasi aktif akan lebih berat.
2. Kontribusi Koperasi dan usaha Mikro terhadap PDRB masih rendah sehingga sulit untuk meningkatkan perekonomian serta membandingkannya dengan PDRB Nasional.
3. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi belum optimal sehingga menjadi penghalang dan tidak mampu untuk mengadopsi teknologi manajemen koperasi yang lebih canggih.
4. Kualitas SDM pengurus/pengelola koperasi yang belum memadai sehingga berpengaruh besar terhadap kinerja pengurus/pengelola koperasi.
5. Kualitas SDM pelaku usaha belum memadai sehingga dapat menyebabkan produk yang dihasilkan kurang berkualitas dan kurang menjawab kebutuhan Masyarakat.



6. Pelaku Usaha Didominasi usaha mikro yang cenderung informal dan bergerak di sektor usaha bernilai tambah rendah
7. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi belum optimal sehingga menyebabkan pelaku UMKM tidak melek digital menjadi semakin terpinggirkan dalam ekosistem bisnis yang semakin mengarah pada digitalisasi dan rentan terhadap persaingan yang semakin ketat dari bisnis yang lebih modern
8. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi pada koperasi syariah, sehingga menyulitkan dalam pengembangan koperasi syariah dan pencapaian kawasan bebas riba.
9. Terbatasnya dukungan Anggaran dalam upaya Pengembangan dan Pemberdayaan baik Koperasi maupun UKM, sehingga sasaran kegiatan masih terbatas

6.2. Isu Strategis

Dari berbagai permasalahan tersebut bisa dikaitkan dengan isu strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelembagaan dan Pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah belum optimal.
2. Masih rendahnya kepercayaan, minat masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Usaha Koperasi.
3. Kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil terhadap Akses Pemodalannya masih terbatas.
4. Kemampuan Koperasi UKM dalam memanfaatkan Teknologi Informasi masih rendah.
5. Diversifikasi Produk UKM potensial belum berkembang secara optimal.
6. Belum tersedianya Basis data UKM yang akurat.
7. Kurangnya UKM yang Berbadan Usaha
8. Perlindungan terhadap produk UKM belum berjalan optimal
9. Lemahnya Sumber Daya pengelola Koperasi UKM

Disamping itu juga isu gender yang ada di Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB adalah masih rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT Berbasis Gender, Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Menengah berbasis gender berjalan lambat dan terbatasnya SDM berbasis gender yang memiliki kualifikasi pada Koperasi Syariah.

6.3 Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan kegiatan urusan Koperasi Usaha kecil dan menengah, Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar segala tindak dan pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang system perencanaan nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1996 tentang Perkoperasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Peraturan Gubernur (Perpub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

Dalam perkembangan isu strategis pembangunan daerah serta perkembangan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibutuhkan perencanaan pembangunan yang kongkrit dan berkelanjutan guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

Sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan daerah diperlukan perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang dielaborasi dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kabupaten/Kota, daerah Provinsi, hingga nasional.

Pendekatan Pembangunan daerah terdiri dari beberapa aspek antara lain 1) Kondisi Geografis Daerah dimana kondisi di masing masing tidak ada yang sama sehingga apabila daerah tersebut memiliki beberapa potensi dan adanya keanekaragaman geografi maka akan menentukan kemajuan pembangunan di daerah tersebut, 2) Demografi dimana keadaan perbedaan demografi suatu daerah sangat menentukan perkembangan daerah tersebut, 3) potensi Sumber daya daerah semakin banyak potensi sumber daya suatu daerah akan meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah tersebut, 4) Ekonomi dan keuangan daerah dimana keuangan daerah juga sangat menentukan adanya sumber pendanaan yang digunakan untuk



pembangunan suatu daerah, 5) Aspek Kesejahteraan Masyarakat semakin sejahtera masyarakat maka akan meningkatkan pendapatan perkapita suatu daerah, 6) Aspek pelayanan Umum Dimana pembangunan diarahkan untuk pemenuhan pelayanan umum atau publik, 7) aspek daya saing daerah dimana semakin besar daya saing daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut.

Dalam perkembangan wilayah regional wilayah nusa tenggara terdapat beberapa isu antara lain 1) Wilayah Nusa Tenggara menjadi wilayah yang memiliki pertumbuhan terendah sebesar 2,4 % pada tahun 2021, 2) ada tiga (3) sektor dominan pendorong pertumbuhan sektor konstruksi, pertanian dan perdagangan, 3) Belum optimalnya keunggulan wilayah pada sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata, 4) Belum optimalnya peran wilayah gerbang wisata ala dan budaya melalui MICE, 5) Transformasi ekonomi daerah belum optimal, 6) pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan, pertambangan masih terbatas, 7) daerah rawan bencana dimana sebagian wilayah nusa tenggara merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu adanya antisipasi dalam penanggulangan bencana yang akan terjadi sewaktu-waktu. Seiring adanya perkembangan isu global yaitu 1) Covid -19 dimana saat ini masa adaptasi dan dampak dari covid-19 yang mengakibatkan perekonomian di beberapa sektor lumpuh bahkan mati sehingga perekonomian perlu ditumbuhkan dan digerakkan lagi sehingga perekonomian menjadi meningkat, 2) Perubahan Iklim, 3) Krisis Ekonomi dan 4) Currency ekonomi dan dari hasil evaluasi RPJMD pada tahun 2019-2023 antara lain Peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Pengendalian stabilitas harga Komoditas, Peningkatan

Standar Hidup dan daya beli masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang berkelanjutan serta peningkatan tata kelola pemerintahan maka disusunlah tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi NTB tahun 2024-2026 terdiri tujuh tujuan dan tiga belas sasaran strategis. Tujuh Tujuan Pembangunan Daerah provinsi NTB tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT).
- 3) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri.
- 4) Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri.
- 5) Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.
- 6) Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- 7) Terwujudnya peningkatan daya saing daerah.

Adapun 13 sasaran strategis Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah.
2. Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan serta derajat kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT).

4. Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi risiko bencana
5. Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara.
6. Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fiik) dan rohaniiah (non fiik).
7. Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan.
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan public.
9. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah.
10. Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
11. Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan pedesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi.
12. Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional.
13. Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor.

Berdasarkan tujuan dalam RPD di atas maka sasaran yang ditetapkan khususnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)

INDIKATOR KINERJA KORPORATIF & MANAJEMEN SUMBER MANUSIA		
Indikator	Tujuan	Strategi

TUJUAN DARI SASARAN MISI YANG TERLAMBAKIR	TUJUAN DAN SASARAN DARI KOPERASI LKIP PROVINSI NTB	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	PENJELASAN
Menyediakan sarana perangkat kerja kegiatan K. 1.1.1.1.1 K. 1.1.1.1.2 K. 1.1.1.1.3 K. 1.1.1.1.4	Menyediakan sarana perangkat kerja kegiatan K. 1.1.1.1.1 K. 1.1.1.1.2 K. 1.1.1.1.3 K. 1.1.1.1.4	Menyediakan sarana perangkat kerja kegiatan K. 1.1.1.1.1 K. 1.1.1.1.2 K. 1.1.1.1.3 K. 1.1.1.1.4	5	Menyediakan sarana perangkat kerja kegiatan K. 1.1.1.1.1 K. 1.1.1.1.2 K. 1.1.1.1.3 K. 1.1.1.1.4 Sumber data: DOK. KOPERASI DAN LKIP
Menyediakan sarana perangkat kerja kegiatan K. 1.1.1.1.1 K. 1.1.1.1.2 K. 1.1.1.1.3 K. 1.1.1.1.4	Menyediakan sarana perangkat kerja kegiatan K. 1.1.1.1.1 K. 1.1.1.1.2 K. 1.1.1.1.3 K. 1.1.1.1.4	Menyediakan sarana perangkat kerja kegiatan K. 1.1.1.1.1 K. 1.1.1.1.2 K. 1.1.1.1.3 K. 1.1.1.1.4	5	Menyediakan sarana perangkat kerja kegiatan K. 1.1.1.1.1 K. 1.1.1.1.2 K. 1.1.1.1.3 K. 1.1.1.1.4 Sumber data: DOK. KOPERASI DAN LKIP
Tujuan	Tujuan	Strategi		
INDIKATOR KINERJA KORPORATIF TATA KELOLA KEPERKERJAAN DARI				
Indikator	Tujuan	Strategi		
Menyediakan sarana perangkat kerja kegiatan K. 1.1.1.1.1 K. 1.1.1.1.2 K. 1.1.1.1.3 K. 1.1.1.1.4	Menyediakan sarana perangkat kerja kegiatan K. 1.1.1.1.1 K. 1.1.1.1.2 K. 1.1.1.1.3 K. 1.1.1.1.4	Menyediakan sarana perangkat kerja kegiatan K. 1.1.1.1.1 K. 1.1.1.1.2 K. 1.1.1.1.3 K. 1.1.1.1.4	5	Menyediakan sarana perangkat kerja kegiatan K. 1.1.1.1.1 K. 1.1.1.1.2 K. 1.1.1.1.3 K. 1.1.1.1.4 Sumber data: DOK. KOPERASI DAN LKIP

Berdasarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sektor Koperasi dan UKM Provinsi NTB sesuai Renstra Perangkat Daerah 2024 - 2026 serta indikator dan targetnya setiap tahun disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas
Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2024 – 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET RPJ 2024-2026		
					2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7
1.	Tercapainya kualitas SOM UKM NTB yang KUAT	Meningkatnya kualitas SOM UKM NTB yang KUAT	Persentase jumlah start up (Perusahaan rintisan) yang berkembang dan bertahan kewirausahaan	%	4 - 5	5 - 7	7 - 10
2.	Tercapainya pemerataan pendapatan koperasi UMKM	Meningkatnya pemerataan pendapatan koperasi UMKM	Persentase Peningkatan produktivitas Sub Sektor KURUM	%	4,8	4,9	5
3.	Tercapainya peningkatan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi	Meningkatnya peningkatan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi	Persentase Koperasi Modern	%	40	50	55
4.	Tercapainya kemandirian fiskal koperasi UKM	Meningkatnya kemandirian fiskal Koperasi UKM	Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi UKM (Pribadi)	%	7-10	10-15	+15

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2022



TABEL 2.3

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAN TARGET
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2024
1	Terwujudnya kualitas SDM UKM NTB yang KUAT	Meningkatnya kualitas SDM UKM NTB yang KUAT	Persentase pendampingan up (perbaikan) inovasi yang berkualitas dan penerapan inovasinya	4,3%
2	Terwujudnya peningkatan produktivitas koperasi UKM	Meningkatnya peningkatan produktivitas koperasi UKM	Persentase Peningkatan produktivitas Sub Sektor UKM	4,8%
3	Terwujudnya perlindungan sosial, pengembangan modal, pemerataan, pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat bagi koperasi	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan modal, pemerataan, pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat bagi koperasi	Persentase Koperasi Modern	40%
4	Terwujudnya keasutan dan keberlanjutan Sektor Koperasi UKM	Meningkatnya keasutan dan keberlanjutan Sektor Koperasi UKM	Persentase peningkatan pertumbuhan PADI Dinas Koperasi UKM Berkelanjutan	7-10 %

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat Skema antara tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran dan target Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024 sebagai berikut:

- Tujuan Pertama Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, yaitu Terwujudnya kualitas SDM UKM NTB yang KUAT, dengan sasaran Meningkatnya



kuualitas SDM UKM NTB yang KUAT dan Indikator Tujuan yaitu Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) serta target di tahun 2024 adalah 4-5 %

- Tujuan ke dua Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB yaitu Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi UMKM dengan Sasaran Meningkatnya pemerataan pendapatan koperasi UMKM serta Indikator Tujuan/Sasaran adalah Persentase Pertumbuhan produktivitas Sub Sektor KUKM dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2024 adalah 4,8%
- Tujuan ke Tiga Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB yaitu Terwujudnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi dengan sasaran Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi serta indikator tujuan/sasaran adalah Persentase Koperasi Modern dengan Target Kinerja Sasaran Tahun 2024 adalah 40 %.
- Dan Tujuan ke Empat Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB yaitu Terwujudnya kemandirian fiskal koperasi UKM, dengan Sasaran Meningkatnya kemandirian fiskal Koperasi UKM serta Indikator Tujuan/ Sasaran Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi UKM (Retribusi) dan Target Kinerja Tahun 2024 adalah 7-10%.

Dalam rangka memenuhi Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 Dinas Koperasi UKM telah Menprogamkan 6 (Enam) Program yaitu:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Pelatihan Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
5. Program Pengembangan UMKM
6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

2.2 Rencana Strategis 2024-2026

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB adalah organisasi perangkat daerah pendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi kawasan regional Bali Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan dengan indikator kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.4
INDIKATOR KINERJA DAN TARGET RENSTRA
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
TAHUN 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET		
			2024	2025	2026
1	Persentase jumlah start up (Perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan	%	4-5	5-7	7-10
2	Persentase Pertumbuhan produktivitas Ibu Sektor KUKM	%	4,8	4,9	5
3	Persentase Koperasi Modern	%	40	50	60
4	Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi UKM (Retribusi)	%	7-10	10-15	>15

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2022

Dari tabel diatas Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai Indikator Kinerja sesuai Rencana Strategis yang terdiri dari 4 (empat) indikator serta target dari Tahun 2024 -2026 dimana untuk pencapaian target Indikator Kinerja tersebut didukung oleh beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di tahun anggaran 2024 yaitu :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
5. Program Pengembangan UMKM
6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Berdasarkan Indikator Kinerja, maka dapat dijabarkan sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Koperasi, dan UKM yang Tangguh, Unggul, Produktif, Mandiri dan BerdayaSaing yang dikelola Secara Profesional dan ditopang oleh Kegiatan Ekonomi Anggotanya.
- 2) Tersedianya Koperasi yang memiliki legalitas kelembagaan dan usaha yang mandiri dan berdaya saing.
- 3) Terwujudnya jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta kerjasama antar koperasi yang saling menguntungkan;
- 4) Semakin berkualitasnya Koperasi dibidang manajemen, pemodalan dan administrasi;
- 5) Pembinaan dan Pengawasan koperasi;
- 6) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang perkoperasian dan terpublikasinya informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- 7) Tersedianya KSP/USP yang memiliki akses terhadap pembiayaan, pemodalan, jaringan usaha dan kemitraan;

- 8) Terwujudnya stabilitas iklim usaha KSP/USP yang didukung oleh kelembagaan yang sehat, SDM dan pemodalan yang berkualitas sesuai anggaran dasar dan prinsip koperasi;
- 9) Dukungan Pengembangan Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil;
- 10) Terciptanya Cita Sang KUMK;
- 11) Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang Berkualitas;
- 12) Tersedianya UMKM yang kompeten dibidang pemasaran dan jaringan usaha;
- 13) Tersedianya UMKM yang memiliki legal aspek usaha serta sarana dan prasarana usaha yang memadai;
- 14) Tersedianya UMKM yang memiliki akses terhadap produksi dan pengolahan, SDM dan teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomi produktif serta UMKM yang responsif gender;
- 15) Terwujudnya akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP didukung oleh legalitas dan administrasi KSP/USP yang berkualitas;
- 16) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang UMKM dan terpublikasinya informasi UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- 17) Terwujudnya koordinasi yang efektif dengan stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat KUMKM melalui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM;
- 18) Tersedianya data perencanaan dan teridentifikasinya kebutuhan diklat KUMKM;
- 19) Tersedianya SDM aparatur dan pengelola KUMKM yang profesional;
- 20) Termonitor dan terevaluasinya efektivitas kegiatan KUMKM pasca Diklat.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang



tertuang pada Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB 2024 - 2028, sebagai berikut:

TABEL 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARUHAN				REKAM JEJAK
				2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memptimalkan kinerja organisasi	Persentase jumlah tim kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi	%	100	100	100	100	Yang optimal pada skala provinsi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi
								Penyakit: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
2.	Memptimalkan pelayanan publik	Persentase kepuasan pengguna layanan publik	%	100	100	100	100	Yang optimal pada skala provinsi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi
								Penyakit: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
3.	Memptimalkan pelayanan masyarakat	Persentase jumlah masyarakat yang puas dengan pelayanan publik	%	100	100	100	100	Yang optimal pada skala provinsi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi
								Penyakit: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
4.	Memptimalkan kinerja organisasi	Persentase jumlah tim kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi	%	100	100	100	100	Yang optimal pada skala provinsi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi
								Penyakit: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB 2024

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Program/kegiatan maka diberikan perjanjian kinerja (PK) yang merupakan dokumen perutusan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah (PK eselon II, PK eselon III, PK eselon IV) Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan instansi pemerintah yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas dengan mengacu pada rencana strategis dinas.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan/komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan memperimbangkan sumber daya yang dimilikinya. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan untuk Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB. Dengan adanya perjanjian ini maka akan menjadi alat untuk memonitor, mengantalkan dan mengevaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun Tujuan Perjanjian kinerja antara lain :

- a) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja pemberi amanah.
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara khusus tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja aparatur sekaligus sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan *Punishment* (sanksi).

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan memperimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih difokuskan terhadap

berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024, sebagai berikut:

TABEL 2.6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB

NO	SARANAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2024
1	Meningkatnya kualitas SDM UKM NTB yang KUAT	Persentase jumlah start up, pertumbuhan, efisiensi yang berkembang dari pelatihan dan pembinaan kewirausahaan	4-5%
2	Meningkatnya pemerataan pendapatan koperasi UMKM	Persentase Pemutakhiran produk-produk Sub Sektor EKUM	4-8%
3	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan akses keuangan bagi koperasi	Persentase Koperasi Modern	60%
4	Meningkatnya kemandirian Sakal Koperasi UKM	Persentase pencapaian persentase PAD Dinas Koperasi UKM (Rendahnya)	7-10 %

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Prov NTB, 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai 4 (Empat) Saranan Strategis yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas SDM UKM NTB yang KUAT;
- Meningkatnya pemerataan pendapatan koperasi UMKM;
- Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi;
- Meningkatnya kemandirian Sakal Koperasi UKM.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya setiap "Sasaran Strategis" yang tertuang pada "Perjanjian Kinerja Tahun 2024", sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya kualitas SDM UKM NTB yang KUAT"

dengan indikator kinerja "Persentase jumlah startup (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan", Indikator Kinerja ini, dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (Ukum) (Balatop)

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Ketenagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Ukum Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Ukum Dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan

2. Program Pengembangan UMKM (Bidang UKM)

Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Literasi Hukum Dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku Ukum

Sasaran Strategis " 2. Meningkatnya pemerataan pendapatan koperasi UMKM "

Dengan Indikator Kinerja : Persentase Pertumbuhan produktivitas Sub Sektor KUKM, Indikator Kinerja ini, dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (Bidang Pembinaan Koperasi)

Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha

2. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (Ukm) (Bidang Pembinaan UKM)

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan :

- Menumbuhkembangkan Ukm Untuk Menjadi Usaha Yang Tangguh Dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengentasan Kemiskinan
- Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Ukm Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Ukm Dan Kewirausahaan
- Pendampingan Dan Bantuan Hukum Bagi Usaha Kecil

Sasaran Strategis 3, " Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi "

Dengan Indikator Kinerja "Persentase Koperasi Modern", Indikator Kinerja ini dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (Bidang Pembinaan Koperasi)

Kegiatan : Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Untas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (Bidang FPSP)

Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, Dan Pemodalannya

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Bidang Pengawasan)

- Kegiatan : Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Kegiatan : Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (Balakop)

Kegiatan : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi

Sasaran Strategis 4,* Meningkatkan kemandirian fiskal Koperasi UKM *

Dengan Indikator Kinerja "Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi UKM (Retribusi)" Indikator Kinerja ini, dicapai melalui program Penunjang Usaha Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KNERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar oleh sebab itu untuk Pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Provinsi NTB menganalisa pencapaian kinerjanya secara rinci berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Beberapa pengertian terkait pengelolaan urusan ini adalah sebagai berikut:

- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- Omzet Penjualan adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang didapat dari penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Untuk Kriteria omzet penjualan tahunan dan modal usaha antara lain : usaha mikro memiliki omzet penjualan tahunan antara 0-2 miliar rupiah, usaha kecil yaitu yang memiliki omzet penjualan tahunan antara 2-15 miliar rupiah dan Usaha menengah memiliki omzet penjualan tahunan antara 15-50 miliar rupiah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tolok ukur keberhasilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diukur dari pencapaian 4 (empat) indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan bagian dalam Rencana Strategis Tahun 2024–2026, yaitu: 1. Persentase Jumlah Start-Up (perusahaan rintisan) yang Berkembang dari Pelatihan Kewirausahaan (%), 2. Pertumbuhan Produktivitas Sub Sektor KUKM (%), 3. Koperasi Modern (unit), 4. Persentase Peningkatan Penerimaan PAD Dinas Koperasi dan UKM (retribusi) (%).

Berdasarkan target Indikator Kinerja dan realisasi capaian Kinerja tahun 2024, dapat diketahui bahwa terdapat ada 4 (empat) sesuai strategi dengan 4 (empat) indikator kinerja dimana 3 (tiga) indikator kinerja terlaksana dengan baik dan 1 (satu) indikator kinerja yang belum terlaksana dengan baik karena Data BPJS belum tersedia sehingga pertumbuhan sub sektor KUKM pada PDRB NTB belum mendapatkan data PDRB khususnya sektor UKM.

Gambaran kondisinya dituangkan dalam Tabel di bawah ini dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah



DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB

14

Modal / ATR

OMzet

Mikro : < 1 M

MK 0 - 2 M

Kecil : 1 - 5 M

KM 2 - 15 M

Menengah : 5 - 10 M

M 15 - 50 M

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2028 :

TABEL 3.1
TARGET DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas SDM KUKM NTB yang KUAT	Persentase jumlah start-up (perusahaan rintisan) yang Berkembang dan Pelatihan Kewirausahaan (%)	4 – 5%	4,54%	100 %
2.	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Koperasi UNKM	Pertumbuhan Produktivitas Sub Sektor KUKM (%)	4,8	NA	NA
3.	Meningkatnya Perlindungan Sosial, Pengembangan Mata Pencarian, pemberdayaan Sosial dan Inklusi Keuangan bagi Koperasi	Koperasi Modern (%)	40% (30 koperasi)	40% (30 Koperasi)	100%
4.	Meningkatnya Kemudahan Faskas Koperasi UKM	Persentase Peningkatan PAD Dinas Koperasi UKM (Retribusi)	7 – 10%	123,04%	123,04%

Sumber: Dinas Koperasi (KM) Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan tabel di atas, semua indikator sasaran mencapai target, kecuali Pertumbuhan Produktivitas Sub Sektor KUKM (%), yang sampai saat ini datanya belum tersedia.

Pencapaian capaian (KU), sebagai berikut:



3.1.1. Capaian Sasaran "Meningkatnya kualitas SDM UKM NTB yang KUAT" dengan Indikator Sasaran Persentase Jumlah Start-Up (perusahaan rintisan) yang Berkembang dari Pelatihan Kewirausahaan

- Membandingkan Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

TABEL 3.2
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas SDM UKM NTB yang KUAT	Persentase jumlah start-up (perusahaan rintisan) yang Berkembang dari Pelatihan Kewirausahaan (%)	4-5%	100%	100%

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Keberhasilan pelaksanaan sasaran Meningkatkan kualitas SDM UKM NTB yang KUAT diukur dengan indikator Persentase Jumlah Start-Up (perusahaan rintisan) yang Berkembang dari Pelatihan Kewirausahaan

Sasaran dan indikator menggambarkan jumlah usaha/perusahaan rintisan yang timbul setelah adanya kegiatan pelatihan kewirausahaan. Untuk Tahun 2023 Pengembangan start-up dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah start-up yang terdata pada Badan Riset dan Inovasi Daerah sebanyak 12 start-up pada tahun 2022 dan 27 start-up pada tahun 2023. Pada tahun 2024, Persentase Jumlah Start-Up (perusahaan rintisan) yang Berkembang dari Pelatihan Kewirausahaan pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 4 start-up yang memenuhi kriteria start-up sehingga pada Tahun 2024 realisasi sebesar 4,54% start-up yang berkembang dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB (4,54% didapat dari perhitungan jumlah start-up dibagi jumlah pelatihan kewirausahaan = $5 \text{ startup} / 110 \text{ orang} \times 100 \%$). angka ini sudah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 4-5% start-up dengan capaian kinerja sebanyak 100 %.

Adapun data 5 Start-Up yang berkembang dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
START-UP YANG BERKEMBANG DARI KEGIATAN PELATIHAN
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB TAHUN 2024

NO	LOKASI	LOKASI DESA	LOKASI	NO	LOKASI	JENIS PRODUK/USHA	NO HP
1	KALIA KAWA KORAN	KALIA KAWA KORAN	KALIA KAWA KORAN	1	KALIA KAWA KORAN	PRODUK KALIA KAWA KORAN	0812-1234567
2	KALIA KAWA KORAN	KALIA KAWA KORAN	KALIA KAWA KORAN	2	KALIA KAWA KORAN	PRODUK KALIA KAWA KORAN	0812-1234567
3	KALIA KAWA KORAN	KALIA KAWA KORAN	KALIA KAWA KORAN	3	KALIA KAWA KORAN	PRODUK KALIA KAWA KORAN	0812-1234567
4	KALIA KAWA KORAN	KALIA KAWA KORAN	KALIA KAWA KORAN	4	KALIA KAWA KORAN	PRODUK KALIA KAWA KORAN	0812-1234567
5	KALIA KAWA KORAN	KALIA KAWA KORAN	KALIA KAWA KORAN	5	KALIA KAWA KORAN	PRODUK KALIA KAWA KORAN	0812-1234567

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 perlu adanya keselarasan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja, untuk Tahun 2023 terdapat 2 Sasaran Strategis yaitu (1) Meningkatnya Koperasi Berprestasi, (2) Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah dengan 3 Indikator Sasaran yaitu (1) Persentase Pertumbuhan Koperasi, (2) Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang Menerapkan Polas Syariah serta (3) Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah, sementara untuk Tahun 2024 terdapat 4 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang tidak selaras dengan Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Pada Tahun 2023 yang menyebabkan tidak bisa membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

- **Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026, maka untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas SDM UKM NTB yang KUAT dengan indikator Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan yang telah tercapai ditabulasikan dalam Tabel berikut :

TABEL 3.4

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

NO	INDIKATOR STRATEGIS	DESKRIPSI KINERJA	TARGET AKHIR RENCANA RPD TAHUN 2024	TARGET KINERJA SAMPAI TAHUN 2024		PENCAPAIAN 2024
				TARGET	REALISASI	
1	Meningkatkan jumlah UKM yang telah tercapai dari 10.000 menjadi 12.000	Peningkatan jumlah UKM yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan yang telah tercapai ditabulasikan	1.10 %	4.9%	4.50%	44.55 %

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2024

- **Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional**
Hingga saat ini, belum terdapat standar nasional yang sama untuk membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional di Kementerian Koperasi dan UKM RI baik dalam sasaran strategis dan indikator kinerja untuk penentuan target kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sasaran strategis Meningkatkan kualitas SDM UKM NTB yang KUAT dengan indikator Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan) dalam mencapai sasaran strategis diidentifikasi dengan kriteria Star-Up yang telah mengikuti diklat dengan predikat Baik ada 5 Star-Up. Realisasi Indikator kinerja tahun 2024 pada sasaran strategis ini sebesar 4,54 % dari target kinerja sebesar 4-6%, dengan capaian sasaran mencapai 1,14% pencapaian sasaran strategis ini masih terlalu minim karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yaitu :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana diklat, sehingga pada diklat tertentu para peserta tidak mendapatkan fasilitas asrama yang dapat memudahkan akses akomodasi peserta selama diklat.
2. Adanya individual differences peserta diklat dalam hal daya serap menerima pengetahuan yang bersumber dari widyaiswara ataupun dari narasumber luar Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja sehingga dapat melebihi target yang direncanakan tahun 2024, antara lain karena ketersediaan fasilitator dari luar dan Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan Pendidikan dan Latihan kewirausahaan bagi start-up. Untuk meningkatkan kinerja indikator ini di masa mendatang, dapat dilakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan diklat;
- 2) Menewitalisasi Gedung Balai Pelatihan dan Pendidikan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.
- 3) Pemanfaatan pre-test yang dilakukan pada awal dan Post-test yang dilakukan pada akhir kegiatan diklat untuk mengetahui basic knowledge dan potensi daya serap yang dimiliki oleh peserta diklat.
- 4) Mengundang Fasilitator Luar Daerah yang bersertifikasi untuk meningkatkan pemahaman para wirausaha baru atau start up (perusahaan rintisan)
- 5) Memanfaatkan Gedung PLUT Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB sebagai Sarana Pendidikan dan Latihan UMKM

2.1.2 Capaian Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya pemerataan pendapatan koperasi UMKM" dengan indikator sasaran Pertumbuhan Produktivitas Sub Sektor KURKM

- Membandingkan Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

TABEL 3.5
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis			Indikator	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya	Pemerataan	Pertumbuhan	Pertumbuhan Produktivitas Sub Sektor UMKM (%)	4,3	56	56

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2024



Dapat dilihat dari tabel di atas capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan pemerataan pendapatan koperasi UMKM dengan indikator sasaran Pertumbuhan Produktivitas Sub Sektor KUKM yang menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor KUKM pada PDRB dengan target 4,8 % belum dapat diukur dari formulasi yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 disebabkan Data BPJS belum tersedia untuk sub sektor KUKM sehingga untuk capaian sasaran strategis ini belum bisa tercapai.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil mengakibatkan terjadinya perubahan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini tentunya berdampak pada keberadaan jumlah unit pada masing-masing kategori dimaksud yang berdampak pada penghitungan produktivitasnya. Penghitungan produktivitas sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui pendekatan peningkatan jumlah unit usaha yang diasumsikan ada peningkatan produktivitas di dalamnya. Secara umum jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2024 sebanyak 324.624 unit usaha meningkat 44.025 unit usaha atau 15,89% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya tambahan pendataan di Kabupaten Lombok Utara dan Sumbawa Barat. Jumlah UMKM Provinsi NTB Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.6

JUMLAH UMKM PROVINSI NTB PER 31 DESEMBER 2024 BERDASARKAN
PENETAPAN KATEGORI USAHA BERDASARKAN NILAI PENJUALAN

No	Kabupaten	Skala Usaha Tahun 2024			
		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Lombok Barat	55.453	17	3	55.473
2	Lombok Tengah	64.801	21	10	64.832
3	Lombok Timur	73.385	90	24	73.499
4	Sumbawa	14.516	24	7	14.547
5	Dompur	23.142	4	-	23.146
6	Bima	23.599	14	8	23.621
7	Sumbawa Barat	14.930	146	13	15.089
8	Lombok Utara	28.719	195	23	28.937
9	Kota Mataram	10.560	2	-	10.562
10	Kota Bima	14.910	1	1	14.912
Jumlah		324.021	514	89	324.624

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, 2024

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 perlu adanya keselarasan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja, untuk Tahun 2023 terdapat 2 Sasaran Strategis yaitu (1) Meningkatnya Koperasi Berprestasi, (2) Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah dengan 3 Indikator Sasaran yaitu (1) Persentase Pertumbuhan Koperasi, (2) Persentase Pertumbuhan KSPKUSP yang Menerapkan Polres Syariah serta (3) Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah, sementara untuk Tahun 2024 terdapat 4 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang tidak selaras dengan Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Pada Tahun 2023 yang menyebabkan tidak bisa membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026, maka untuk sasaran strategis Meningkatkan pendapatan koperasi UMKM dengan indikator sasaran Pertumbuhan Produktivitas Sub Sektor KUKM yang telah tercapai ditunjukkan dalam Tabel berikut:

TABEL 3.7
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN
KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

No.	MATERI WISATAKUN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN STR AKHIR TAHUN 2024	TARGET KINERJA		CAPAIAN 2024
				TARGET	REALISASI	
1	Strateginya pemerataan pendapatan koperasi UMKM	Pemerataan Pertumbuhan produktivitas Sub Sektor KUKM	4,5%	4,5%	Data SP2 belum tersebut	SA

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2024

- Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
Hingga saat ini, belum terdapat standar nasional yang sama untuk membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional di Kementerian Koperasi dan UKM RI baik dalam sasaran strategis dan indikator kinerja untuk penentuan target kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
Sasaran strategis Meningkatkan pemerataan pendapatan koperasi UMKM dengan indikator sasaran Pertumbuhan Produktivitas Sub Sektor KUKM dalam mencapai sasaran strategis diidentifikasi dengan menggambarkan pertumbuhan

produktivitas sub sektor KUKM pada PDRB dari target RPD sebesar 4,8% bila dibandingkan dengan Target Rencana OPD belum bisa tercapai karena dipengaruhi oleh faktor penghambat, yaitu:

- 1) Belum tersedianya Data BPS terkait PDRB Sub Sektor KUKM
- 2) Kesulitan dalam mendapatkan informasi terkait kontribusi sektor KUKM terhadap PDRB
- 3) kualitas SDM pelaku usaha belum memadai sehingga dapat menyebabkan produk yang dihasilkan kurang berkualitas dan kurang menjawab kebutuhan Masyarakat.
- 4) Pelaku Usaha Didominasi usaha mikro yang cenderung informal dan bergerak di sektor usaha bernilai tambah rendah
- 5) Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi belum optimal sehingga menyebabkan pelaku UMKM tidak melek digital menjadi semakin terpinggirkan dalam ekosistem bisnis yang semakin mengarah pada digitalisasi dan rentan terhadap persaingan yang semakin ketat dari bisnis yang lebih modern
- 6) Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi pada koperasi syariah, sehingga menyulitkan dalam pengembangan koperasi syariah dan pencapaian kawasan bebas rba.
- 7) Terbatasnya dukungan Anggaran dalam upaya Pengembangan dan Pembedayaan UKM, sehingga sasaran kegiatan masih terbatas

Upaya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB untuk meningkatkan kapasitas UMKM dilakukan melalui pembinaan dan pembedayaan UMKM dengan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dengan Pendidikan dan Pelatihan pada Balai Diklat Koperasi UMKM maupun kolaborasi dengan mitra seperti Grab, Traveloka, BI, BNI, UNIDO, BCA,

2. Bekerjasama dengan UNIDO yang merupakan lembaga PBB untuk mempersiapkan UMKM NTB berskala export.
3. Perluasan jaringan pemasaran dan promosi melalui fasilitasi pada gelaran/ event internasional maupun daerah seperti MotoGP, WSBK, MXGP, Event Pacuan Kuda, dan pameran-pameran daerah lainnya.
4. Fasilitasi akses pembiayaan dan penguatan permodalan melalui KUR, LPOB, Bank, Non Bank, BUMBU/UMD, Swasta).
5. Pemanfaatan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT – KUMKM) untuk melakukan Pendampingan Usaha.
6. Berkordinasi dengan BPS dan ODD terkait dengan Dinas Koperasi sehingga data PORB di Sub sektor KUKM dapat tersedia.
7. BPS harus melakukan pendataan/penghitungan kontribusi sektor KUKM terhadap PORB

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB juga melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada UMKM melalui salah satu unit kerjanya, yaitu Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM). PLUT-KUMKM bertugas memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada KUMKM secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saingnya. PLUT-KUMKM memiliki 7 (tujuh) bidang layanan pendampingan, yaitu (1) Bidang Kelembagaan, (2) Bidang Produksi, (3) Bidang Pemasaran, (4) Bidang Pembiayaan, (5) Bidang Sumber Daya Manusia, (6) Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi, dan (7) Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha.



Kinerja PLUT KUMKM tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 3.8
REALISASI CAPAIAN KINERJA PLUT-KUMKM PADA
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB TAHUN 2023-2024

No.	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
1	Jumlah UMK dan wirausaha yang dilayani	6.181	6.200	6.543
2	Jumlah Koperasi yang dilayani	42	42	45
3	Jumlah koperasi yang mendapatkan sertifikat NIK	10	10	3
4	Jumlah Koperasi KUBK dan wirausaha yang didampingi memperoleh pinjaman	5.109	5.109	5.450
5	Jumlah Koperasi UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh akses pemasaran melalui online digital	705	705	730
6	Jumlah Koperasi UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh akses pendanaan bank termasuk KUR	32	32	41
7	Jumlah Koperasi UMK dan wirausaha yang didampingi mengikuti pelatihan	290	290	274
8	Layanan PLUT yang tersedia	9	9	9

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah UMK dan wirausaha yang dilayani pada tahun 2024 dengan target 6.200 UMK/wirausaha realisasi 6.543 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 6.181 UMK/wirausaha. Jumlah Koperasi yang dilayani target 42 Koperasi realisasi 45 koperasi lebih banyak dibandingkan Tahun 2023 yaitu sebanyak 42 Koperasi. Jumlah koperasi yang mendapatkan sertifikat NIK

pada Tahun 2023 sebanyak 10 koperasi lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2024 dari target 10 koperasi hanya dapat terrealisasi sebanyak 3 koperasi. Jumlah Koperasi KUMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh perijinan Tahun 2024 dengan target 5.169 Koperasi KUMK dan wirausaha realisasi 5.450 Koperasi KUMK dan wirausaha mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebanyak 5.169 Koperasi KUMK dan wirausaha. Jumlah Koperasi UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh akses pemasaran termasuk online (digital) mengalami peningkatan di Tahun 2024 target 705 Koperasi KUMK dan wirausaha realisasi 730 mengalami peningkatan dari Tahun 2023 sebanyak 705 Koperasi KUMK dan wirausaha. Jumlah Koperasi UMK dan wirausaha yang didampingi memperoleh akses pembiayaan bank termasuk KUR pada Tahun 2024 dengan target 32 Koperasi KUMK dan wirausaha realisasi 41 Koperasi KUMK dan wirausaha tentu mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebanyak 32 Koperasi KUMK dan wirausaha. Jumlah Koperasi UMK dan wirausaha yang didampingi meningkat omsetnya Tahun 2024 dengan target 200 Koperasi KUMK dan wirausaha realisasi 274 Koperasi KUMK dan wirausaha berbeda jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebanyak 200 Koperasi KUMK dan wirausaha.

3.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi" dengan indikator Persentase Koperasi Modern

- Membandingkan Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024



TABEL 3.9
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2024

No	Isuan Strategis	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Percepatan Pertumbuhan Penguasaan Rilis Persebaran Persebaran Sisa dan Hiliris Keuangan (Rp) 100%	Koperasi Aktif (%)	40% (3 Koperasi)	40% (3 Koperasi)	100%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, 2024

Jumlah koperasi di Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 4.726 koperasi, terdiri dari koperasi aktif sebanyak 2.483 Koperasi (53,73%) dan koperasi tidak aktif sebanyak 2.243 koperasi (46,27%). Ditandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 4.726, terdapat peningkatan 109 koperasi (2,31%). Koperasi dapat dikategorikan aktif jika melakukan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, karena jika koperasi tidak melakukan rapat anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka pemerintah dapat melakukan pembubaran. Persentase koperasi aktif binaan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi dan UKM merupakan koperasi yang domisili anggotanya lintas kabupaten/kota. Perkembangan koperasi di Provinsi NTB tahun 2012-2024 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.10
JMLAH KOPERASI AKTIF DAN TIDAK AKTIF
PROVINSI NTB TAHUN 2024

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2024 (Unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Matarom	161	435	596
2	Lombok Barat	207	340	547
3	Lombok Utara	140	42	182
4	Lombok Tengah	308	385	693
5	Lombok Timur	315	297	612
6	Sumbawa Barat	235	164	399
7	Sumbawa	265	86	351
8	Dompus	188	189	377
9	Bima	235	84	319
10	Kota Bima	115	102	217
11	Provinsi	314	119	433
Total		2483	2.243	4726

Sumber: Data Koperasi dan UKM Provinsi NTB, 2024

Tabel 3.11
PERKEMBANGAN KOPERASI AKTIF DAN TIDAK AKTIF
PROVINSI NTB TAHUN 2023-2024

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2023 (Unit)			Tahun 2024 (Unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Matarom	161	435	596	161	435	596
2	Lombok Barat	207	340	547	207	340	547
3	Lombok Utara	140	42	182	140	42	182
4	Lombok Tengah	308	385	693	308	385	693
5	Lombok Timur	315	297	612	315	297	612
6	Sumbawa Barat	235	164	399	235	164	399
7	Sumbawa	265	86	351	265	86	351
8	Dompus	188	189	377	188	189	377
9	Bima	235	84	319	235	84	319
10	Kota Bima	115	102	217	115	102	217
11	Provinsi	314	119	433	314	119	433
Total		2.343	2.243	4.586	2483	2.243	4726

Sumber: Data Koperasi dan UKM Provinsi NTB, 2024

TABEL 3.12
PERBANDINGAN REALISASI, CAPAIAN DAN TARGET KOPERASI MODERN
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
TAHUN 2023 DAN 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2023		TAHUN 2024		CAPAIAN %
		REALISASI	CAPAIAN %	TARGET (Pn)	REALISASI (Pn)	%
1	KOPERASI MODERN (U)	3 KOPERASI	0	30 KOPERASI	30 KOPERASI	100%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, 2024

Pada tahun 2024, ditetapkan target terbentuknya koperasi modern sebanyak 40% (30 unit koperasi) realisasi sebesar 40 % (30 Koperasi) dengan capaian 100%. Koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance), memiliki days saing, dan adaptif terhadap perubahan. Modernisasi Koperasi merupakan upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju dalam organisasi, tata kelola dengan penerapan teknologi informasi, dan mengikut perkembangan jaman, serta mengarahkan koperasi agar memiliki perangkat digital yang memadai seperti website, sistem keuangan dan akuntansi elektronik, pencatatan anggota elektronik, dan perangkat digital lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi. Pada tahun 2024 Koperasi Modern sebanyak 3 (tiga) Koperasi, sedangkan usulan Koperasi Modern untuk tahun 2024 sebanyak 30 koperasi. Daftar Koperasi Modern Provinsi NTB tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

KOPERASI MODERN BINAAN DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2024

No	Nama Koperasi	Alamat	Kabupaten/Kota
1	Koperasi Jasa BGR Logistik Indonesia Sejahtera Abadi	Jln Parjitar Negara No. 110 Perumnas Tanjung Karang Kecamatan Sukarbela	Mataram
2	Koperasi Konsumen Kemala Husada Bhayangkara	Jln. Langko No. 54, Kel Amperan Selatan Kecamatan Ameran Kota Mataram	Mataram
3	Koperasi Konsumen Mulara Amanah Syariah	Jalan Perjanggik No. 30 Mataram	Mataram
4	Koperasi Konsumen Serba Usaha RSUD Kota Mataram	Jln. Bung Karno No. 3 Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram	Mataram
5	KSP Mitra Lestari	Jln. Amir Hamzah Lingkungan Karang Sukun Bars Kecamatan Mataram	Mataram
6	Koperasi Konsumen Bina Ventura Sejahtera	Jln. Sandubaya No. 99 Kecamatan Sandubaya Kota Mataram	Mataram
7	Koperasi Konsumen Pegawai Bank Indonesia (KOPESBI) Mataram	Jln. Pejanggalik No. 02 Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Mataram	Mataram
8	Koperasi Syariah Sepekat Sejahtera	Jln. Airlangga No. 56 Mataram	Mataram
9	KSPPS Ngiring Tunas Paice	Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah	Lombok Tengah



No	Nama Koperasi	Alamat	Kabupaten/Kota
10	KSP Cinta Damai	Jln. Raya Ancek Timur Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara	Lombok Utara
11	Koperasi Konsumen Syariah Batu Hiji	Townsite Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa	Sumbawa
12	Koperasi Pegawai Negeri Karya Praja	Jln. Pejanggal Mataram/Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram
13	Koperasi Konsumen Pegawai Telekomunikasi Palapa	Jln. Langko No. 84 Mataram	Mataram
14	Koperasi Konsumen Rsa Sejahtera Jaya	Jln. Pejanggal No. 115 Cakranegara	Mataram
15	Koperasi Konsumen Pegawai Dan Pensiunan Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Barat	Jln. Langko 108 Mataram	Mataram
16	Koperasi Konsumen Lentera Pabuh Pacu	Jln. Majapahit Kuta Mataram	Mataram
17	KSP Madani NTB	Jl. Raya Tanjung Kecamatan Tanjung Lombok Utara	Lombok Utara
18	Koperasi Konsumen Sahabat Sehat Syariah	Jalan Pejanggal No. 78 A Selong Lombok Timur	Lombok Timur
19	Koperasi Lumba-Lumba	Desa Lember Selatan Kecamatan Lember Kabupaten Lombok Barat	Lombok Barat
20	Koppas Elina Harapan Sejahtera	Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat	Lombok Barat

No	Nama Koperasi	Alamat	Kabupaten/Kota
21	Koperasi Konsumen Unit Desa Akl Warang Kawo	Jln. Raya Lintas Batanyala Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah	Lombok Tengah
22	KSPPS BMT Tunas Harapan Syantara	Dusun Majeneng Montong Gading Kab. Lombok Timur	Lombok Timur
23	Koperasi Jasa Angkutan Laut Karya Bahari	Jalan Raya Pelabuhan Bangsal Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara	Lombok Utara
24	Koperasi Wanita Moleko Bengkil	Dusun Dasan Tengak Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kab. Lombok Utara	Lombok Utara
25	Koperasi Konsumen BMT Syariah Insan Samawa	Jln. Selia Budi Nomer 12 A Seketeng Kec. Sumbawa	Sumbawa
26	KPR Bhakti Husada	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa	Sumbawa
27	KPRI Sehat	Jln. Raya Jenderal Sudirman No. 13 Bada Kabupaten Dompu	Dompu
28	Primer Koperasi POLRES Dompu	Jln. Bhayangkara No. 09 Dompu Bada Kabupaten Dompu	Dompu
29	Primer Koperasi POLRES Kota Bima	Desa Mongganoo Kecamatan Mpuda Kota Bima	Kota Bima
30	Koperasi Karyawan Karina	Desa Mongganoo Kecamatan Mpuda Kota Bima	Kota Bima

Sumber: Data Koperasi UMR Puskas MPO Tahun 2024

Untuk ke depan, diperlukan perbaikan sarana prasarana teknologi dan Sumber Daya Manusia pengelola koperasi agar kinerjanya lebih optimal.



Selain melakukan pembinaan terhadap koperasi modern, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB juga mengawal program Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba. Kawasan bebas riba adalah suatu area atau sentra dimana terdapat 75% UMK sebagai anggota, atau terdapat dua atau lebih kelompok masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi, simpanan, pinjaman dan pembiayaan serta sosial ekonomi lainnya dengan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS/USPPS-KOP) atau dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Tujuan Penetapan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba adalah:

1. Memotivasi percepatan pertumbuhan dan Pengembangan Kawasan Bebas Riba,
2. Meningkatkan pemahaman pengurus/pengelola, anggota dan calon anggota koperasi serta masyarakat sekitarnya tentang keuntungan bermuamalah dengan sistem Syariah,
3. Pemertapan misi koperasi dalam mencapai tujuan koperasi, yaitu kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya melalui pengintegrasian sumber daya insani (kecerdasan spiritual, emosional dan ilmu pengetahuan), kekuatan ekonomi, sosial dan bina umat.

Jumlah Koperasi Syariah Provinsi NTB Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14
JUMLAH KOPERASI SYARIAH PROVINSI NTB
TAHUN 2024

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Tahun 2024
1.	Provinsi	118
2.	Matsram	27
3.	Lombok Barat	36
4.	Lombok Utara	18
5.	Lombok Tengah	123
6.	Lombok Timur	66
7.	Sumbawa Barat	15
8.	Sumbawa	11
9.	Dompu	18
10.	Bima	35
11.	Kota Bima	12
Total		479

Sumber: Dinas Koperasi UPM Provinsi NTB Tahun 2024

Pada Tahun 2024 target Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba sebanyak 2 (dua) Koperasi, dari target tersebut terealisasi sebanyak 2 Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba dengan capaian 100%.

Sampai dengan tahun 2024, jumlah Koperasi syariah kawasan bebas riba berjumlah 18 unit tersebar Kabupaten/Kota se-NTB, sebagai berikut:

Tabel 3.15

**DAFTAR KOPERASI SYARIAH
PENGEMBANGAN KAWASAN BEBAS RIBA
PROVINSI NTB SID TAHUN 2024**

No	Nama Koperasi Syariah	Alamat	Tahun
1	KSU SYARIAH BMT AL-HIDAYAH UMAT SEJAHTERA	Jl. Jurusan Kotaraja – Tete Batu Kecamatan Sikar Lotim	2019
2	KOPERASI SYARIAH AL-IRRAWAN AMANAH SEJAHTERA	Jln. Suralaga-Lenek Kampung Kepah Desa Suralaga Kec. Suralaga Lombok Timur	2019
3	KOPONTREN AL-MUTMA'INNAH	Lombok Barat, Jln. Akhlaqi Amin Desa Dasan Baru Kedri Lombok Barat	2019
4	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wanita Mula Amanah Makmur	Jalan Amir Hamzah No. 12 Lingkungan Karang Sukun Kel. Mataram Timur Kec. Mataram	2020
5	Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Terpadu Syariah	Jalan Raya Rarang KM.35 Mataram, Desa Rarang Kec. Terasa Kabupaten Lombok Timur	2020
6	Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Harapan Syariah	Jln. Jurusan Kotaraja – Montong Gading, Kelurahan Montong Betok Kec. Montong Gading – Lombok Timur	2020
7	Koperasi Syariah Karya Ma'nu' Bersama	Marong Jamak Selatan, Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram	2021

No	Nama Koperasi Syariah	Alamat	Tahun
8	Koperasi Syariah Amanah Mekar Mandiri	Pasar Baru Kecamatan Joleweh Kabupaten Sumbawa Barat	2021
9	Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Insan Samawa	Jalan Serba Budi No. 12 A Kelurahan Seketeng Kec Sumbawa Kab. Sumbawa	2021
10	Koperasi Produsen Gema Mandiri Syariah	Jl. Abd. Razak, SH Kel. Kelayu Jorong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur	2022
11	Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatu Mustafid	Jl. TGH. M. Adnan, Batu Rimpang Barat, Desa Badhain, Narmada, Lombok Barat	2022
12	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nurul Iman Wal Amai	Jalan Kesejahteraan Kelurahan Lelirado Kec. Mpunda Kota Bima	2022
13	Koperasi Konsumen Syariah Swadaya Bersama	Pagutan, Kota Mataram	2023
14	Koperasi Produsen Mandiri Amanah Sejahtera	Jonggal, Kabupaten Lombok Tengah	2023
15	Koperasi Produsen Serba Usaha Syariah Baroqah Sementon Jati	Pronggarata, Kabupaten Lombok Tengah	2023
16	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pondok Pesantren Al Mukhlisin Syariah	Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur	2023
17	KSPPS Wanita Aiyah Lelok	Dusun Tenggara, Desa Gondang Kecamatan	2024

No	Nama Koperasi Syariah	Alamat	Tahun
		Gangga, Kabupaten Lombok Utara	
18	Koperasi Produsen Tani Syariah Senu Dane Bhlis	Dusun Bettebek Desa Pengembur Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	2024

Sumber: Data Koperasi dan UNPD Provinsi NTB, 2024

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 perlu adanya keselarasan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja, untuk Tahun 2023 terdapat 2 Sasaran Strategis yaitu (1) Meningkatnya Koperasi Berprestasi, (2) Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah dengan 3 Indikator Sasaran yaitu (1) Persentase Pertumbuhan Koperasi, (2) Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang Menerapkan Polas Syariah serta (3) Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah, sementara untuk Tahun 2024 terdapat 4 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang tidak selaras dengan Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Pada Tahun 2023 yang menyebabkan tidak bisa membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023.

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026, maka untuk sasaran strategis Meningkatnya perlindungan sosial, pengentasan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi dengan indikator Persentase Koperasi Modern yang telah tercapai ditabulasikan dalam Tabel berikut:

TABEL 3.16

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA ANGKAP 500 AKHIR TAHUN 2024	TARGET KINERJA		CAPAIAN 2024
				TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatkan pertumbuhan modal, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi tingkat desa/kecamatan	Persentase Koperasi Modern	40%	40%	40%	100%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, 2024

• **Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Hingga saat ini, belum terdapat standar nasional yang sama untuk membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional di Kementerian Koperasi dan UKM RI baik dalam sasaran strategis dan indikator kinerja untuk penentuan target kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

• **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kepagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Sasaran strategis Meningkatkan perledungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi dengan indikator Persentase Koperasi Modern target RPD sebesar 40% bisa dibandingkan dengan Target Renstra OPD sudah mencapai target yaitu 40 % dengan capaian sebesar 100 %. Adapun beberapa faktor penghambat dalam dalam pencapaian target, yaitu:

- 1) Persyaratan memperoleh izin cukup sulit dipenuhi koperasi
- 2) Persyaratan koperasi modern cukup sulit serta sarana prasarana dan SDM belum memadai
- 3) Rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga pengelolaan koperasi kurang sehat kurang transparan dan

akuntabel, menyebabkan tingginya persentase koperasi tidak aktif yang menjadikan sasaran pembinaan koperasi dalam rangka meningkatkan koperasi aktif akan lebih berat.

- 4) Kontribusi Koperasi dan usaha Mikro terhadap PDRB masih rendah sehingga sulit untuk meningkatkan perekonomian serta membandingkannya dengan PDRB Nasional.
- 5) Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi belum optimal sehingga menjadi penghalang dan ketidak mampuan untuk mengadopsi teknologi manajemen koperasi yang lebih canggih.
- 6) Kualitas SDM pengurus/pengelola koperasi yang belum memadai sehingga berpengaruh besar terhadap kinerja pengurus/pengelola koperasi.
- 7) Terbatasnya dukungan Anggaran dalam upaya Pengembangan dan Pemberdayaan baik Koperasi maupun UKM, sehingga sasaran kegiatan masih terbatas.

Dalam upaya penumbuhan Koperasi Modern dan Koperasi Syariah, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB melakukan berbagai kegiatan, yaitu :

1. Fasilitasi sarana prasarana dan peningkatan kapasitas SDM pengelola
2. Mendorong koperasi memenuhi persyaratan izin
3. Pendampingan dan Mendorong Koperasi agar bisa menjadi Koperasi Modern
4. Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Modern
5. Mengaudit koperasi yang bermasalah dan mendorong agar melaksanakan RAT setiap Tahun
6. Koordinasi Penguatan Peran Perkopysyah dalam rangka Pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi di NTB
7. Sosialisasi Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Kab/kota se NTB
8. Verifikasi Pengembangan Kawasan Bebas Riba di Lombok Tengah dan Lombok Utara
9. Rapat Penguatan Koperasi Syariah Pengembangan Kawasan Bebas Riba.



10. Pemberian Pegang penghargaan kepada 2 Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba:

- a. KSPPS Warita Aiyah Lekok, Dusun Tenggara, Desa Gondang Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
- b. Koperasi Produsen Tani Syariah Semu Dane Ikhlas, Dusun Bahubelek Desa Pengembur Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

3.1.4 Capaian Sasaran Strategis 4 "Meningkatnya kemandirian fiskal Koperasi UKM" dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi UKM (Retribusi)

- **Membandingkan Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

TABEL 3.17
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kemandirian Fiskal Koperasi	Persentase Peningkatan PAD Dinas Koperasi UKM (Retribusi)	7 - 9%	125,04%	125,04%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, 2024

Meningkatnya kemandirian fiskal Koperasi UKM" dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi UKM (Retribusi) ini menggambarkan pertumbuhan PAD diukur dari pencapaian tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. PAD Tahun 2024 meningkat 125,04% dibandingkan 2023 yang disebabkan karena adanya peningkatan pemasukan atas sewa ruang dan penginapan dari kegiatan Pelatihan di Balai Koperasi UKM, salah satu unit kerja dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB.

- **Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 perlu adanya kesesuaian antara sasaran strategis



dengan indikator kinerja, untuk Tahun 2023 terdapat 2 Sasaran Strategis yaitu (1) Meningkatnya Koperasi Berprestasi, (2) Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah dengan 3 indikator Sasaran yaitu (1) Persentase Pertumbuhan Koperasi, (2) Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang Menempatkan Pokas Syariah serta (3) Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah, sementara untuk Tahun 2024 terdapat 4 Sasaran Strategis dan 4 indikator Kinerja yang tidak selaras dengan Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Pada Tahun 2023 yang menyebabkan tidak bisa membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023, tetapi untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi UKM (Retribusi) ini setiap tahunnya ada karena Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB memiliki fasilitas tempat Pelatihan dan Pendidikan perbandingan PAD Tahun 2023 dan 2024 dapat pada tabel berikut :

Tabel 3.18

**FERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI NTB
TAHUN 2023 DAN 2024**

NO	URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Capaian (%)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Capaian (%)
1	PAD	151.400.000	204.450.737	135,04	432.260.000	455.327.445	123,04

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2024

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi UKM (Retribusi)

Indikator ini menggambarkan pertumbuhan PAD dari diukur dari pencapaian tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. PAD Tahun 2024 dengan target Rp. 432.260.000, realisasi Rp. 455.327.445,- capaian sebesar 123,04% dibandingkan Tahun 2023 dengan target Rp. 151.400.000, realisasi Rp. 204.450.737,- yang disebabkan karena adanya peningkatan pemajakan atas sewa ruang dan penghapusan dari kegiatan Pelatihan di Balai KUM, salah satu unit kerja dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB.

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RPD yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis



Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026, maka untuk sesaran strategis Meningkatkan kemandirian fiskal Koperasi UKM dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi UKM (Retribusi) yang telah tercapai ditubuhkan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.19

PERSANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

NO	SARASAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SAMPAI TAHUN 2024 AKHIR TAHUN 2024	TARGET KINERJA		CAPAIAN 2024
				TARGET	REALISASI	
4	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 2024	Peningkatan persentase penerimaan PAD Dinas Koperasi UKM (Retribusi)	>15 %	7-10 %	123,04%	66,87 %

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, 2024

Untuk sesaran strategis keempat Meningkatkan kemandirian fiskal Koperasi UKM dengan indikator Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi UKM (Retribusi) tahun 2024 realisasi sebesar 123,04 dengan capaian 66,87 % dari target 7-10% pada Tahun 2024 ini Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Dinas Koperasi dan UKM Prov. NTB (Retribusi) PAD Tahun 2024 dan untuk target akhir RPD Tahun 2026 akan mencapai > 15 %.

- **Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Hingga saat ini, belum terdapat standar nasional yang sama untuk membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional di Kementerian Koperasi dan UKM RI baik dalam sesaran strategis dan indikator kinerja untuk penentuan target kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.



• **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Sasaran strategis Meningkatkan kemandirian Balai Koperasi UKM dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi UKM (Retribusi) Adapun beberapa faktor penghambat dalam dalam pencapaian target Tahun 2025, yaitu :

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana diklat, sehingga pada diklat tertentu para peserta tidak mendapatkan fasilitas sarana yang dapat memudahkan akses akomodasi peserta selama diklat;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana terutama untuk peserta Disabilitas
- 3) Bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi UKM Provinsi masih Bangunan lama sehingga peserta Diklat Kurang nyaman dan tidak bisa dipergunakan u sewa peruntukan sewa umum

Untuk meningkatkan kinerja indikator ini di masa mendatang, dapat dilakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan diklat
- 2) Penyediaan prasarana khusus disabilitas
- 3) Koordinasi dengan BPKAD untuk membenarkan anggaran revitalisasi Bangunan Gedung Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program, 12 (sembilan) Kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan/linieran kegiatan yang ditabulasikan pada Tabel :

Tabel 3.20
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
TAHUN 2024

No	PROGRAM	Kegiatan/ Sub Kegiatan	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya kualitas SDM UKM NTB yang KUAT"			
1	Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Pengustan Kelengkapan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	BALATKOP
2	Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah 2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	BIDANG UKM
Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya pemerataan pendapatan koperasi UMKM"			
3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Linier Daerah Kabupaten/Kota	BIDANG KOPERASI

		dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		3	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
4	Pembudayaan usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Pembudayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kamitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
		4	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadikan Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
		5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
		6	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil
Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan bagi koperasi"			

5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi	BIDANG KOPERASI
		7 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
6	Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah yang Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		8 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	BIDANG FISP
7	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		9 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		Kegiatan : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	

		Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		10	Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
8	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi		BIDANG FPSP
		11	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodalannya	
9	Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah		BIDANG UKM
		12	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
10	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi		BIDANG PENGAWASAN
		13	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	

11	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi		BIDANG FPSP
		14	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi		
		15	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
Sastra Strategis 4 "Meningkatnya kemandirian fiskal koperasi UKM"				
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		BIDANG KEUANGAN
		16	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI	

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, 2024

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya Laporan Kinerja Diskop UKM yang dihabiskan untuk



Sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024-2026, dimana pada tahun 2024 ini secara umum sasaran strategis dari program kegiatan Realisasi anggaran mencapai 92,09 %.

Dari hasil capaian kinerja diatas dapat meningkatkan motivasi Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB untuk terus meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi secara maksimal terhadap Program Kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini Program program yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran pada tahun 2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misinya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian indikator kinerja secara keseluruhan, yakni dari 4 (empat) Sasaran Strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Hasil capaian kinerja menunjukan bahwa 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dapat mencapai target yang ditetapkan, dan masih ada 1(satu) indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

4.1. Kesimpulan atas Capaian Kinerja

1. Kinerja Organisasi

Dalam upaya mewujudkan Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB di Tahun 2024 telah mencapai 4,54 % dari target yang ditetapkan, jumlah start-up berkembang dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Pada indikator Persentase Pertumbuhan produktivitas Sub Sektor KUKM Tertentu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Opta Kerja yang diundakberjati dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini tentunya berdampak pada keberadaan jumlah unit pada masing-masing kategori dimasuk yang berdampak pada penghitungan produktivitasnya sehingga dari target 4,8 % yang ditetapkan dalam RPD belum mencapai target yang telah ditetapkan ini disebabkan belum tersedia data BPS khususnya di sektor KUKM. Untuk Persentase Koperasi Modern ditetapkan target terbentuknya koperasi modern sebanyak 40% (38 unit koperasi). Koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance), memiliki daya saing, dan adaptif terhadap perubahan. Modernisasi Koperasi merupakan upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju dalam organisasi, tata kelola dengan penerapan teknologi informasi, dan mengikuti perkembangan jaman, serta mengarsnkan koperasi agar memiliki perangkat digital yang memadai seperti website, sistem keuangan dan akuntansi elektronik, pencatatan anggota elektronik, dan perangkat digital lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi. Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi UKM (Retribusi) Indikator ini menggambarkan pertumbuhan PAD dan dukur dan pencapaian tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. PAD Tahun 2024 dengan target 7-10 % capaian indikator kinerja yaitu 123,04% meningkat dibandingkan 2023 yang disebabkan karena adanya peningkatan pemasukan atas sewa ruang dan penginapan dari kegiatan Pelatihan di Balai Korp UKM, salah satu unit kerja dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB



2. Kendala yang dihadapi

1. Perubahan regulasi penetapan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari UUD No 20 tahun 2008 menjadi PP No 7 tahun 2021
2. Moratorium penerbitan usaha simpan pinjam
3. Perubahan persyaratan modal usaha untuk koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi
4. Tingginya prosentase koperasi tidak aktif, menjadikan sasaran pembinaan koperasi dalam rangka meningkatkan koperasi aktif akan lebih berat.
5. Rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga pengelolaan koperasi kurang sehat kurang transparan dan akuntabel
6. Terbatasnya dukungan Anggaran dalam upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, sehingga sasaran kegiatan masih terbatas serta hanya difokuskan pada upaya pengaktifan koperasi.
7. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi pada koperasi syariah, sehingga menyulitkan dalam pengembangan koperasi syariah dan pencapaian kawasan bebas riba
8. Kesadaran masyarakat untuk berkooperasi masih rendah serta kualitas kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada kinerja dan citra koperasi kurang baik.
9. Perumbuhan dan pengembangan Koperasi Syariah diupayakan melalui strategi melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi pelaku Koperasi Syariah, Memfasilitasi akses pembiayaan dengan Lembaga Perbankan Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, Membangun Jaringan Kerjasama baik antar Unit Usaha maupun Lembaga Usaha Terkait. Untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan anggaran optimal yang selama ini anggaran yang tersedia belum optimal
10. Fasilitas biaya notaris untuk pembetulan atau perubahan anggaran dasar menjadi koperasi syariah

11. Pengawasan terhadap koperasi yang dilakukan belum optimal disebabkan karena SDM yang memiliki kompetensi pengawasan masih kurang, anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan belum memadai dan juga sarana dan prasarana yang mendukung kerja pengawasan belum memadai
12. Dilihat dari serapan anggaran, jumlah output capaian dibanding target dan pelaksanaan kegiatan telah cukup optimal. Sedangkan Outcome tergantung dari kemampuan mengimplementasikan pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang telah mengikuti pengembangan kapasitas berupa Bimbingan Teknis, Workshop maupun Peminaan lainnya.
13. Belum adanya data tentang UKM yang valid sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kurang fokus dalam pencapaian indikator.
14. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Koperasi dan UKM Provinsi NTB seluruhnya bersumber dari dana DAK Non Fisk. Ketergantungan terhadap dana DAK Non Fisk ini sangat besar karena belum ada sumber dana dari APBD.
15. Kapasitas dan kompetensi pelaku usaha koperasi dan UMKM masih rendah yang ditunjukan oleh banyaknya permohonan bantuan modal, bantuan peralatan dan fasilitasi pasar, serta pengelolaan koperasi dan UMKM yang sebagian besar belum berbasis digital.
16. Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah berjalan lambat. Pengembangan usaha mikro masih belum diuji oleh semangat kewirausahaan yang kuat karena keterbatasan akses pasar, modal dan alat.
17. Perencanaan pengembangan KUKM masih belum berorientasi ekspor atau berdagang antar daerah. Kualitas, kuantitas dan kontinuitas barang dan jasa yang dihasilkan masih belum mempunyai standar untuk tujuan ekspor.
18. Terbatasnya akses KUKM kepada sumber daya produktif terutama menyangkut pemodalan, proses produksi, teknologi/peralatan,

informasi dan pasar. Hal ini disebabkan sebagian besar pelaku UKM masih berjalan secara tradisional.

4.2. Langkah – langkah dalam rangka peningkatan kinerja

Dalam rangka meningkatkan persentase Koperasi Modern serta peningkatan usaha kol menjadi usaha menengah membutuhkan dukungan dalam upaya peningkatan SDM pengurus, pengelola dan manajer koperasi dan UMKM secara bertahap dan berkelanjutan adapun langkah langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi antar lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UKM melalui pelatihan dan pembinaan.
2. penambahan akses permodalan dan manajemen permodalan bagi Koperasi dan UKM untuk Pengembangan Usaha.
3. Meningkatkan pemahaman tentang akses teknologi Koperasi dan UKM baik dalam penerapan maupun pemanfaatannya.
4. Peningkatan kerjasama terhadap jaringan usaha maupun Lembaga Konsultasi Usaha bagi Koperasi dan UKM
5. Peningkatan terhadap organisasi dan manajemen Koperasi dan UKM, khususnya di tingkat pengelola Koperasi dan UKM
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Koperasi dan UKM
7. Peningkatan kepedulian dan pembinaan dari Instansi/Dinas Sektoral baik vertikal maupun horizontal
8. Peningkatan kualitas tenaga pengawas dan Tenaga Penyuluh koperasi dan UKM
9. Mendorong Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM melalui APBN selain itu bermitra dengan NGO.
10. Mendorong pemerintah pusat, NGO, perbankan dan swasta untuk membuka akses permodalan dengan bunga yang rendah bagi koperasi dan UMKM
11. Bermitra dengan Dinas Kominfo, pihak swasta, NGO untuk membuka akses bagi penerapan dan pemanfaatan IT.

12. Meningkatkan kualitas penyedia jasa pengembangan usaha (PS) dan memperluas jaringan usaha dan jiwa kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM.
13. Meningkatkan pengembangan organisasi dan manajemen Koperasi dan UKM untuk mengelola Koperasi dan UKM secara kontinu dan profesional
14. Mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan PERDA untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
15. Meningkatkan koordinasi instansi/Dinas Sektoral yang terkait dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM baik vertikal maupun horizontal.
16. Mendorong kebijakan pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga penyuluh dibidang koperasi dan UKM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga penyuluh koperasi dan UMKM.

Demikian yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Februari 2025

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat


Ahmad Rasyid, SH
Pemrita Usman Mulya (IVId)
NIP. 19690416 199401 1 001

